

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro,2010),254.

### Buku

Anshori Ibnu, 2017, *Perlindungan Anak....*, Bandung, hal. 57.

Arif Fahrullah Judan, *Problem dan solusi Perkawinan yang belum tercatat oleh Negara, Webinar Kartu Keluarga Siri, solusi dan problematikanya*, Jakarta: Majelis Nasional Porhati 202, h. 18.

Arif Fakrullah Zudan dan Endar Wismulyani, *Tertib Administrasi Kependudukan*, (Klaten: Cempaka Putih,2019), hal,12.

Asri Sfitri Nurul et all, "*Analisis UUP 1/1974 dan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI Nomor. 9 Tahun 2016 Tentang Penggunaan SPTJM Nikah Sirri*", *Bandung Conference Series: Islamic Family Law 2*, No. 2 (Agustus 2022): 47.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah,(Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022).

Dokumen *Company profile* Disdukcapil Kabupaten Lebak.

Lidwa, *Pustaka i-sofwar-kitab Sembilan Imam Hadist*, hal.25.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Syarah Bulughul Maram*, jilid 2 (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press,2015),602.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h.158.

Pulthoni, *Memahami kebijakan Administrasi Kependudukan*, Jakarta: ILRC, 2009, hal. 19.

Sejarah Disdukcapil Kabupaten Lebak .

## **Jurnal**

- Bafadhal Faizah, "Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, tahun 2014, h.1-3.
- Dwi Kurniawan Itok, Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di surakarta, *Jurnal Kerta Semaya* 9 no 10 2021, hal.6.
- Lia Falini Tanjung Vivi, Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data Kelahiran anak dikaitkan dengan pembutan Akta Waris, *Jurnal Restituti*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, hal 24.
- Rasyid Aisyah, Problematika anak sah perspektif hukum perkawinan putusan M. Nomor 46 tahun 2010, *Jurnal Hukum Keluarga Islam STAIN Watang pone* Vol II 2016, hal 222.
- Rosaliza Mita, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dakam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Universitas Riau, Vol.11 No 2 tahun 2015, hal.71.
- Samsul Hidayat Rofik, "Kontroversi SPTJM(surat pernyataan tanggung jawab mutlak)dalam Permendagri Nomor:109 Tahun 2019)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, IAIN Palangka Raya, Vol.6 No 1 Tahun 2022, h.2409-2410.
- Sendy Baby, Hak yang diperoleh anak dari Perkawian tidak dicatat, *Jurnal Hukum*, Responsif FH Unpad Vol 7, 2019, h 4.

## **Skripsi**

- Indra Muluk Lubis Mumammad (0706278112), Jurusan Program Kekhususan Tentang Hukum Perdata Program Sarjana Reguler Depok, Universitas Indonesia, skripsi" *Akibat Hukum dari Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Kedudukan Anak Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46-IDT/2008-PA, tahun 2012*".

Lubis Sulhanuddin (21153046), Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, skripsi” *Implikasi Nikah Di Bawah Tangan Terhadap Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tahun 2019*”.

Putri Riskiyah Septi (C91215152), Jurusan Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, skripsi” *Analisis Yuridis Terhadap (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Kelahiran, tahun 2019*”.

### **Undang-Undang**

Lihat Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Kartu Keluarga, pasal 1 ayat 2

Lihat Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran

Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Pasal 33 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 34 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 48 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 79 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tatacara pendaftaran Penduduk dan catatan sipil.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 Permendagri Nomor 108 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 10 ayat 2 Permendagri Nomor 108 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Ketua Bidang Akta Ibu Marlia Kurniasih, S.E di Disdukcapil Kabupaten Lebak pada tanggal 7 juli 2023.

Wawancara dengan Tenaga Teknis dan Administrasi Ibu Osi Rosdiana Dewi di Disdukcapil Kabupaten Lebak pada tanggal 10 juli 2023.

Wawancara dengan Tenaga Teknis dan Administrasi Ibu Ana Lestari Aguatiana, S.AP di Disdukcapil Kabupaten Lebak pada tanggal 11 juli 2023.